

ANALISIS PERAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DALAM KAPABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI APIP DI KABUPATEN PONOROGO

Edlyn Salsabella¹, Lulus Gadis Sulaksana², Eva Hany Fanida³, Melda Fadiyah Hidayat⁴

Universitas Negeri Surabaya

bellaedlyn@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan publik merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan efektivitas penggunaan sumber daya publik dan anggaran daerah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban sumber daya publik kepada masyarakat. Kondisi kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Indonesia pada saat ini mendapatkan hasil yang tidak memuaskan, berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BPKP telah menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi kapabilitas berada pada level 1. Kondisi tersebut diperoleh berdasarkan dari hasil kriteria yang dikembangkan oleh IIA. Pada tahun 2019 pemerintah telah memiliki target yaitu 85% APIP dan harus berada pada level 3, berdasarkan data tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan kapabilitas aparat di Kabupaten Ponorogo. Pada saat ini Inspektorat Kabupaten Ponorogo baru memenuhi 20 indikator dari 58 indikator (34,5%). Mengkaji dari beberapa faktor yang ada di Inspektorat Kabupaten Ponorogo saat ini belum bisa mencapai level kapabilitas yang lebih baik, dan mengkaji beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ponorogo agar inspektorat tersebut dapat meningkatkan kapabilitasnya. Faktor yang menjadi penyebab kenapa inspektorat tersebut belum bisa mencapai pada level yang lebih tinggi yaitu disebabkan karena kurangnya komitmen dari kepala daerah, kerja tim yang kurang optimal dalam peningkatan kapabilitas, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi. Berdasarkan prinsip good governance, implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya terimplementasi jika belum ada mekanisme pengawasan yang efektif. Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan, rencana, serta tujuan yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Kapabilitas, Peningkatan, Indikator, Keuangan

ABSTRACT

Public financial management is a crucial aspect of regional governance because it directly relates to the effective use of public resources and regional budgets. Various studies have shown that prioritizing transparency and accountability can improve regional government performance through information disclosure and accountability of public resources to the public. The current capability of the Government Internal Supervisory Apparatus in Indonesia is unsatisfactory. Assessments conducted by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) have shown that most capability levels are at level 1. This level is based on criteria developed by the Indonesian Institute of Auditors (IIA). In 2019, the government set a target of 85% APIP, which should be at level 3. Based on this data, efforts are needed to improve the capability of officials in Ponorogo Regency. Currently, the Ponorogo Regency Inspectorate has only met 20 of 58 indicators (34.5%). Examining several factors that prevent the Ponorogo Regency Inspectorate from achieving a higher level of capability, we also examine several efforts that the Inspectorate must undertake to improve its capabilities. The factors contributing to the Inspectorate's failure to reach a higher level include a lack of commitment from the regional head, suboptimal teamwork in capacity building, limited human resources, and a lack of coordination. Based on the principles of good governance, these principles cannot be fully implemented without an effective oversight mechanism. Oversight ensures that all regional financial management processes are carried out in accordance with established regulations, plans, and objectives.

Keywords: Capability, Improvement, Indicators, Finance.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 kementerian keuangan (kemenkeu) memberikan penghargaan kepada kabupaten ponorogo serta 25 Kabupaten/kota lainnya di wilayah Jawa Timur atas predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), predikat ini telah diraih secara lima kali berturut-turut. Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Ponorogo telah memberikan pelayanan yang bertanggung jawab, transparan, dan berkualitas terhadap publik. Selain itu Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah membuktikan konsistensinya dalam mempertahankan predikat tersebut. Kinerja pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan publik dikarenakan masyarakat mulai mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan pemerintah itu sendiri (Afrina, 2015).

Pengelolaan keuangan publik merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, serta akuntabel. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola sumber daya keuangan guna mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kinerja guna mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan publik harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu

komponen penting dalam struktur penerimaan daerah yang menjadi indikator kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi (Purba, 2022).

Pemerintah daerah memiliki tugas yang sangat penting dalam menggali potensi pendapatan asli daerah secara optimal agar dapat mendanai pembangunan dan pelayanan publik tanpa adanya ketergantungan terhadap dana dari pusat. Dalam konteks kabupaten ponorogo, upaya ini dapat dikaji lebih mendalam mengenai meningkatkan pendapatan asli daerah menjadi bagian dari strategi keuangan daerah. Tingkat efektivitas yang tinggi dalam menjalankan pemerintahan terutama pada pemerintahan daerah dapat menunjukkan pencapaian fiskal yang baik dan pengelolaan sumber daya yang optimal. Begitu juga sebaliknya efektivitas yang rendah menunjukkan bahwa terdapat kendala administratif maupun lemahnya kepatuhan yang perlu diperbaiki. Kinerja keuangan daerah pada akhirnya akan tercermin dalam berbagai indikator pengelolaan APBD, salah satunya melalui rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan pendapatan (Idrawahyuni, 2020).

Berdasarkan dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, menyajikan laporan keuangan secara akuntabel sudah menjadi instrumen penting. Namun, capaian opini warga tanpa pengecualian (WTP) yang didapat oleh pemerintah tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hubungan antara kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah selalu berkaitan dengan pengawasan oleh pihak internal. Sehingga menimbulkan masalah berupa bagaimana kualitas laporan keuangan daerah itu dapat berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan bagaimana peran APIP dalam menjalankan fungsi mediasi.

Penelitian ini bertujuan dalam menganalisis pengaruh kualitas penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ponorogo, mengevaluasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai mediasi dalam hubungan antara laporan keuangan daerah dan kapabilitas pengelolaan keuangan daerah baik secara struktural, sumber daya manusia, maupun aspek koordinasi antar lembaga. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat peningkatan kapabilitas APIP di Kabupaten Ponorogo dari level 1 menuju level 3, dan memberikan kontribusi pada literatur keuangan publik terkait *good governance* dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan memahami berbagai faktor secara mendalam diharapkan penelitian ini dapat merumuskan pemahaman yang konseptual serta dapat memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi saat ini, hal ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada prinsip *good governance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan selama satu periode anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan yang disusun harus memenuhi karakteristik kualitatif yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan, sistem pengendalian intern, serta teknologi informasi yang digunakan (Purba, 2022). Laporan keuangan yang berkualitas menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan publik kepada seluruh pemangku kepentingan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan institusi pengawasan internal yang memiliki peran strategis dalam mendukung akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. APIP di tingkat kabupaten/kota diwakili oleh Inspektorat Daerah yang bertugas melakukan audit, rewiw, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kapabilitas APIP diukur menggunakan Internal Audit *Capability Model* (IA-CM) yang dikembangkan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA) dan diadopsi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai standar nasional. Model ini mengelompokkan kapabilitas APIP ke dalam lima level, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). APIP pada Level 1 bersifat reaktif dan belum memiliki prosedur yang terstandarisasi, sedangkan Level 3 menunjukkan bahwa APIP telah mampu mengintegrasikan fungsi audit dengan manajemen risiko dan pengendalian organisasi secara menyeluruh (Purba, 2022). Peningkatan kapabilitas APIP dari Level 1 ke Level 3 memerlukan penguatan sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur teknologi informasi, serta komitmen pimpinan organisasi.

Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen dalam konteks pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Dalam sektor publik, hubungan agensi terjadi antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen yang diberi mandat untuk mengelola sumber daya publik. Permasalahan utama dalam hubungan agensi ini adalah asimetri informasi, yakni kondisi di mana agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan prinsipal terkait penggunaan

sumber daya publik. Laporan keuangan yang berkualitas dan transparansi informasi berperan sebagai instrumen untuk mengurangi asimetri informasi tersebut (Afrina, 2015). APIP sebagai mekanisme pengawasan internal hadir untuk memastikan bahwa agen (pemerintah daerah) menjalankan mandatnya sesuai dengan kepentingan prinsipal (masyarakat), sehingga memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep yang mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan prinsip *good governance* mensyaratkan adanya sistem pengawasan yang kuat dan komprehensif agar pengelolaan keuangan daerah dapat berlangsung secara tertib dan bertanggung jawab (Idrawahyuni, 2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kemandirian fiskal pemerintah daerah yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri. Peningkatan PAD yang optimal memerlukan dukungan tata kelola yang baik, termasuk pengawasan intern yang efektif untuk meminimalkan kebocoran penerimaan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan daerah (Purba, 2022). Rasio efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan menjadi indikator kinerja keuangan yang penting dalam menilai kapabilitas pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam mengenai kondisi yang saat ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait bagaimana kualitas laporan keuangan,

akuntabilitas, dan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan fokus pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Ponorogo. Pendekatan ini memungkinkan peneliti dalam mencari praktik, kendala, serta dinamika yang telah terjadi dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Ponorogo.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk penelitian evaluasi karena mengarah pada gambaran yang lengkap mengenai program-program pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam evaluasi dari informasi yang telah didapat berdasarkan hasil komunikasi dengan beberapa partisipasi. Strategi yang dipilih yaitu dengan menggunakan studi kasus karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam peningkatan kapabilitas APIP dan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut. Menurut Creswell (2014), strategi ini digunakan jika peneliti ingin mengetahui secara cermat, suatu kondisi, aktivitas, dan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo. Temuan ini sejalan dengan teori agensi (*agency theory*) yang menekankan pentingnya pelaporan yang transparan sebagai mekanisme pertanggungjawaban agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat dan pemerintah pusat). Laporan keuangan yang disajikan secara relevan, andal, dapat

dibandingkan, dan dapat dipahami terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih akuntabel.

Keberhasilan Kabupaten Ponorogo dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut mencerminkan komitmen nyata terhadap kualitas pelaporan keuangan. Namun demikian, predikat WTP semata tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur akuntabilitas, mengingat substansi pengelolaan anggaran dan realisasi program pembangunan juga perlu dievaluasi secara komprehensif. Rasio efektivitas dan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi indikator tambahan yang penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh (Idrawahyuni, 2020).

Peran APIP sebagai Mediasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang diwakili oleh Inspektorat Kabupaten Ponorogo menempati posisi strategis sebagai mediator antara kualitas laporan keuangan daerah dan kapabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa peran mediasi APIP bersifat parsial, artinya APIP mampu memperkuat hubungan antara penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas, namun efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya kapabilitas institusional. Kondisi ini tercermin dari fakta bahwa Inspektorat Kabupaten Ponorogo baru memenuhi 20 dari 58 indikator kapabilitas (34,5%), jauh di bawah target pemerintah yang menetapkan 85% APIP harus berada pada level 3 pada tahun 2019. Berdasarkan kerangka Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA), APIP yang berada pada level 1

hanya mampu menjalankan fungsi audit secara reaktif dan belum memiliki prosedur yang terstandarisasi. Untuk meningkat ke level 3 (Integrated), APIP perlu mengembangkan kapabilitas manajemen kinerja, pengelolaan risiko, serta pengawasan berbasis risiko secara menyeluruh. Kondisi kapabilitas APIP yang masih rendah ini sejalan dengan temuan BPKP secara nasional yang menunjukkan mayoritas APIP daerah masih berada pada level 1, mengindikasikan adanya persoalan sistemik dalam penguatan pengawasan internal di tingkat daerah.

Faktor Penghambat Peningkatan Kapabilitas APIP di Kabupaten Ponorogo

Analisis data kualitatif mengidentifikasi empat faktor utama yang menghambat peningkatan kapabilitas APIP di Kabupaten Ponorogo. Pertama, kurangnya komitmen kepala daerah dalam mendukung penguatan fungsi pengawasan internal. Komitmen pimpinan merupakan prasyarat utama karena tanpa dukungan anggaran, kebijakan, dan perhatian dari kepala daerah, upaya peningkatan kapabilitas APIP akan mengalami stagnasi. Kedua, kerja tim yang belum optimal di lingkungan Inspektorat, yang berdampak pada rendahnya sinergi antara audit dalam menghasilkan temuan yang komprehensif dan rekomendasi yang implementatif. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi auditor. Inspektorat Kabupaten Ponorogo menghadapi kendala jumlah auditor yang tidak sebanding dengan beban pengawasan yang harus ditanggung, serta masih minimnya auditor bersertifikasi yang memiliki kompetensi teknis memadai. Keempat, kurangnya koordinasi antara Inspektorat dengan SKPD lain maupun dengan BPKP selaku pembina APIP di tingkat pusat. Koordinasi yang lemah ini mengakibatkan tumpang tindih pengawasan di satu sisi, dan kekosongan pengawasan di sisi lain,

sehingga efektivitas APIP secara keseluruhan menjadi tereduksi (Purba, 2022).

Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Kajian terhadap implementasi prinsip *good governance* di Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa meskipun transparansi dalam penyajian laporan keuangan telah menunjukkan perbaikan yang signifikan, dimensi akuntabilitas dan partisipasi publik masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Prinsip *good governance* tidak dapat berdiri sendiri pada salah satu pilar saja, melainkan harus diimplementasikan secara holistik mencakup transparansi, akuntabilitas, responsivitas, kesetaraan, efektivitas, dan penegakan hukum. Ketika mekanisme pengawasan internal masih lemah, maka prinsip-prinsip tersebut tidak dapat sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pengelolaan keuangan daerah sehari-hari (Afrina, 2015).

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo juga perlu didukung oleh sistem pengawasan internal yang andal. APIP yang kapabel dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi potensi kebocoran penerimaan daerah, memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan retribusi daerah, serta mendorong efisiensi belanja daerah. Dengan demikian, penguatan APIP bukan hanya merupakan kebutuhan administratif, melainkan juga merupakan strategi fiskal yang strategis dalam mendukung kemandirian keuangan daerah jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, kualitas penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

pada SKPD Kabupaten Ponorogo. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi, yang dibuktikan dengan perolehan opini WTP secara konsisten, mampu meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. APIP melalui Inspektorat Kabupaten Ponorogo berperan sebagai mediator dalam hubungan antara laporan keuangan daerah dan kapabilitas pengelolaan keuangan, namun efektivitas peran mediasi tersebut masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kondisi kapabilitas APIP yang masih berada pada level 1, di mana Inspektorat baru memenuhi 20 dari 58 indikator kapabilitas yang ditetapkan. Rendahnya kapabilitas ini berdampak langsung pada belum optimalnya fungsi pengawasan intern dalam mendorong akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Faktor utama yang menghambat peningkatan kapabilitas APIP di Kabupaten Ponorogo, yaitu: (1) kurangnya komitmen kepala daerah dalam mendukung penguatan APIP; (2) kerja tim yang belum optimal di lingkungan Inspektorat; (3) keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kompetensi; serta (4) lemahnya koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pengawasan. Keempat faktor ini saling berkaitan dan membentuk hambatan struktural yang perlu ditangani secara bersamaan melalui pendekatan yang komprehensif.

Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo masih memerlukan penguatan, khususnya pada dimensi akuntabilitas dan mekanisme pengawasan. Tanpa adanya pengawasan intern yang efektif dan kapabel, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat diimplementasikan secara penuh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kapabilitas APIP merupakan agenda mendesak yang harus menjadi prioritas pembangunan

tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan temuan penelitian ini, direkomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Ponorogo meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi auditor Inspektorat, memperkuat komitmen kepala daerah melalui regulasi internal yang mewajibkan tindak lanjut rekomendasi APIP, serta membangun sistem koordinasi yang lebih sinergis antara Inspektorat, SKPD, dan BPKP. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah studi serta mengkaji variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi kapabilitas APIP, seperti dukungan teknologi informasi dan budaya organisasi pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Afrina, Y. (2015). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 12(1), 45–63.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2021). *Pedoman Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta: BPKP.

Idrawahyuni. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Rasio Efektivitas, Efisiensi, dan Pertumbuhan Pendapatan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(2), 112–130.

Institute of Internal Auditors (IIA). (2017). *Internal Audit Capability Model (IA-CM) for the Public Sector*. Florida: The Institute of Internal Auditors Research Foundation.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Purba, R. (2022). Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik dan Keuangan Daerah*, 8(1), 77–95.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Widodo, T., & Kusuma, H. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 5(2), 134–151.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset